

PENGARUH HABITUS DAN KAPITAL DALAM KEMENANGAN KIAI BLATER SEBAGAI BUPATI¹

Tunjung Sulaksono, Suswanta²

Salah satu masalah penting dan menarik pasca Orde Baru adalah maraknya keterlibatan elit agama dalam politik praktis. Era reformasi memberi peluang yang sama kepada semua pihak untuk terlibat dalam politik, termasuk kiai. Kiai yang sebelumnya hanya menjadi pemain belakang, sekarang menjadi pemain depan bahkan ada yang terpilih menjadi pemimpin politik (*political leader*). Sebagai aktor yang memiliki kharisma dan basis massa, maka kiai memiliki peran strategis jika menjadi pemain politik. Pergeseran fokus kajian Ilmu pemerintahan dari *government* ke *governance* membawa implikasi masuknya kiai sebagai bagian elemen society menjadi aktor pemerintahan. Penelitian ini dilandasi oleh ketidakpuasan terhadap penjelasan-penjelasan yang ada tentang penelitian tindakan politik kiai. Dengan meminjam konsep habitus, kapital dan arena Pierre Bourdieu, penelitian ini bertujuan untuk mencari perspektif baru tentang keterlibatan kiai dalam politik, dalam hal ini motivasi kiai terjun dalam politik dan faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilannya. Pijakan empiris studi di kabupaten Bangkalan karena bupati terpilih dibesarkan dalam tradisi dan komunitas kiai maupun blater. Kiai dan blater adalah dua rezim yang sama-sama memiliki legitimasi sosial kuat di Bangkalan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kiai blater menjadi bupati adalah lebih karena ingin memperluas lokus dan pengaruh politiknya, bukan pertimbangan amar ma'ruf nahi munkar. Habitus sebagai blater lebih dominan pengaruhnya dibanding habitus kiai. Hal ini terlihat dari penggunaan semua cara dalam meraih maupun mempertahankan kekuasaannya.

Kata Kunci : Kiai, Blater, Habitus dan Kapital

PENDAHULUAN

Salah satu masalah penting dan menarik di era reformasi adalah maraknya keterlibatan para pemimpin agama dalam proses politik. Era reformasi memberi kesempatan kepada semua pihak, termasuk kiai³ untuk terjun dalam dunia politik praktis. Kiai yang dulu hanya dimanfaatkan sebagai pendulang massa dan pembaca doa oleh politisi pada waktu kampanye, sekarang tidak lagi berada di belakang panggung, tapi maju ke depan panggung. Kiai tidak lagi sekedar menjadi makelar budaya (*cultural broker*), akan tetapi menjadi pemain politik (*political player*) dalam pemilu legislatif, presiden maupun pemilihan kepala daerah. Seiring dengan pergeseran fokus kajian ilmu pemerintahan dari *government* ke *governance*, maka kiai sebagai salah satu elemen society memiliki hak yang sama untuk menjadi pemain politik. Beberapa kiai bahkan ada yang terpilih menjadi pemimpin politik

¹ Makalah Seminar Nasional APSIPI, Kamis 24 November 2016, Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur

² Dosen-dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY

³ Kiai merupakan kata yang sangat familiar dalam masyarakat Indonesia, bahkan khas (*genuine*) dari Indonesia. Terminologi kiai dalam arti cerdas pandai dalam agama Islam telah menjadi terminologi sosiologis-religius yang mengakar kuat dalam kultur masyarakat Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa timur. Di daerah lain di Indonesia, ada beberapa sebutan yang secara substansial maknanya sama dengan kiai. Di Jawa Barat ada sebutan Ajengan, di Aceh ada sebutan Teungku Dayah, di Minangkabau ada sebutan Buya, dan di Nusa Tenggara Barat ada sebutan Tuan Guru.

(*political leader*). Salah satunya adalah kiai Fuad Amin Imron yang terpilih sebagai bupati Bangkalan dua periode yaitu dari tahun 2003-2013.

Sebagai aktor yang mempunyai kharisma dan basis massa, maka kiai memiliki peran strategis jika menjadi pemain politik. Penelitian ini dilandasi oleh ketidakpuasan terhadap penjelasan-penjelasan yang ada tentang tindakan politik kiai dan bertujuan untuk mencari perspektif baru tentang keterlibatan kiai dalam politik, secara khusus motivasi keterlibatan kiai dalam politik dan faktor penentu keberhasilannya menjadi pejabat publik. Sejauh penelusuran penulis, ada dua perspektif tentang keterlibatan kiai dalam politik, yaitu antipati politik⁴ dan simpati politik,⁵ akan tetapi keduanya belum menjelaskan indikator keberhasilannya. Perspektif *antipati politik* dibangun atas asumsi bahwa pada dasarnya Islam dan politik itu terpisah. Dengan demikian, habitus, fungsi dan tugas antara kiai dan politisi itu berbeda. Habitus kiai adalah nilai-nilai pesantren, yaitu nilai-nilai religius, seperti sabar, tawakal, ikhlas dan sederhana, sementara dunia politik identik nilai pragmatis, oportunis, pamrih dan gaya hidup mewah. Dunia kiai adalah agama yang sakral dan dogmatis, sementara dunia politik adalah profan yang menuntut rasionalisasi dan sekulerisasi. Ranah gerakan kiai adalah kultural yang berorientasi sosial kemasyarakatan, sedangkan ranah gerakan politisi adalah politik yang berorientasi kekuasaan. Keterlibatan kiai dalam politik hanya akan berdampak negatif baik bagi kiai sendiri, umat maupun bagi agama. Kiai akan mengalami delegitimasi peran, fungsi dan moral. Umat, terutama santri akan terlantar karena tidak ada lagi yang mengajari dan membimbing mereka. Pesantren dan madrasah tidak akan berkembang karena sang kiai sibuk dengan urusan politik. Hadirnya kiai dalam politik juga akan menyuburkan fenomena politisasi agama, yaitu penggunaan simbol-simbol agama untuk kepentingan politik jangka pendek yang bersifat duniawi dan materi. Dengan demikian, kiai harus kembali ke habitatnya ke pesantren sebagai guru yang mendidik umat dengan agama dan keteladanan. Politik biarlah menjadi habitat politisi yang profesional. Tugas kiai adalah menjaga moral politik, jika terjadi penyimpangan dan pembusukan. Kiai harus mengawasi, mengingatkan, dan menegur politisi jika salah arah tanpa harus terjun ke dunia politik. Politik kiai adalah politik moral dan kebangsaan bukan politik praktis dan pragmatis.

Kelemahan asumsi perspektif antipati politik adalah bertentangan dengan hakekat fakta dan sejarah Islam yang tidak membedakan agama dan politik. Pernyataan bahwa keterlibatan kiai dalam politik pasti berakibat negatif juga problematik, mengingat ada kiai

⁴ Antipati mempunyai dua arti, *Pertama*, penolakan atau perasaan tidak suka yang kuat. *Kedua*, perasaan menentang objek tertentu yang bersifat personal dan abstrak. Lihat Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), Cetakan Ketiga, hal. 43

⁵ Sementara itu, simpati bermakna rasa suka, rasa kasih atau rasa setuju kepada. Lihat, Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Ibid*, hal. 841

politisi yang tetap bersih dan idealis berkomitmen pada moral. Nabi, para sahabat dan para kiai baik di kalangan NU maupun organisasi Islam lain yang menjadi *founding fathers* negeri ini menjadi bukti masih ada kiai politisi yang bersih.

Sementara itu, perspektif kedua yaitu *simpati politik* dibangun di atas asumsi yang berbeda dengan perspektif antipati politik. Asumsi perspektif kedua adalah bahwa Islam tidak memisahkan agama dan politik. Dalam pandangan Islam, politik adalah bagian dari agama. Muhammad SAW bukan sekedar nabi, tetapi juga sekaligus politisi. Sejarah mencatat bahwa Muhammad SAW dalam kurun waktu singkat selama 23 tahun tidak hanya berhasil melakukan revolusi moral melalui karir kenabian, melainkan juga revolusi sosial dan politik melalui pembentukan sistem masyarakat dan politik di Madinah. Sebagai politisi, Muhammad SAW telah membangun “kontrak politik” yang dikenal dengan “*Mitsaq al-Madinah*” atau Piagam Madinah antara umat Islam dan kelompok sosial lain di Madinah. Piagam tersebut adalah “*watsiqah siyasiyah*” atau dokumen politik yang menjamin kebebasan beragama, berpendapat, perlindungan atas negara, hak hidup, hak milik, dan pelarangan kejahatan.⁶ Meskipun tidak sebagai nabi, akan tetapi kepemimpinan khalifah pasca nabi adalah kepemimpinan agama sekaligus politik. Berkaitan dengan itu menarik apa yang dikatakan K.H. Abdullah Faqih pengasuh pondok pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur bahwa sebagai pewaris para nabi (*waratsatul anbiya*), maka keterlibatan kiai dalam dunia politik adalah sebuah keharusan.⁷

Perspektif kedua ini mampu memberi penjelasan tentang landasan syar’i penyatuan agama dan politik. Nabi, para sahabat dan ulama memberi teladan bahwa politik adalah dalam rangka menegakkan *amar ma’ruf nahi munkar*. Teladan yang diberikan nabi, para sahabat dan ulama memang bisa menjadi inspirasi dan ilham bagaimana berpolitik di era global ini, akan tetapi tentu bukan berarti berfungsi sebagai “juklak” dan “juknis” yang harus diterapkan 100% tanpa ada perubahan, mengingat ada perbedaan konteks sosial, politik, dan sejarah. Perspektif kedua ini belum mampu memberi penjelasan tentang fenomena kiai politisi yang korup, pragmatis dan melakukan politisasi agama untuk kepentingan duniawi. Dengan kata lain, perspektif kedua ini belum memberi penjelasan indikator keberhasilan politik kiai agar konstruktif dan solutif. Bertolak dari hal ini, menjadi penting perumusan perspektif baru terkait keterlibatan kiai dalam politik yang sesuai dengan tantangan saat ini, khususnya indikator keberhasilannya, agar politik kiai memberi kontribusi dan solusi.

Penelitian ini mengadopsi perspektif simpati politik untuk mengembangkan perspektif baru tentang keterlibatan kiai dalam politik. Pijakan empiris yang digunakan adalah keterlibatan kiai dalam pemilihan bupati di kabupaten Bangkalan, Madura. Kasus Bupati

⁶ Muhammad Husein Haikal, *Hayat Muhammad* dalam Uliil Absar- Abdalla, *Muhammad : Nabi dan Politikus*, Media Indonesia, 4 Mei 2005. Lihat juga <http://islamlib.com>, 4 Mei 2005

⁷ Ibid

Bangkalan Madura ini menjadi contoh “sempurna” tentang pergeseran habitus dari kiai ke politisi dan ekonomisasi kapital simbolik yang dilakukan bupati kiai. Untuk menelaah secara objektif dan mendalam, peneliti menggunakan teori Struktural Genetik Pierre Bourdieu. Asumsi yang digunakan adalah kiai dipandang sebagai manusia yang mempunyai kepentingan duniawi dan ukhrowi, sehingga bisa melakukan tindakan yang benar atau salah. Kiai dipahami sebagai individu yang terus berproses dan bergerak sesuai situasi aktual, bukan individu dengan ciri dan karakter tetap. Dengan demikian, untuk memahami tindakan politik kiai perlu diperhatikan berbagai faktor sosial yang mempengaruhinya seperti hubungan perkawinan, jaringan transmisi ilmu, organisasi keagamaan dan politik, ideologi dan ajaran, serta heterogenitas maupun variasi pemikirannya.

Merujuk Bourdieu, kehidupan sosial adalah medan pertarungan setiap anggota masyarakat, dan kelompok sosial dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan posisinya, baik dalam hal penguasaan maupun akumulasi modal ekonomi, sosial, simbolik, maupun kulturalnya.⁸ Berkaitan dengan itu, untuk memahami keterlibatan kiai dalam politik, menjadi penting diungkapkan modal yang dimiliki kiai seperti pemilikan tanah atau pesantren, bisnis, pengetahuan agama dan cara transmisinya, hubungan perkawinan, serta jaringan yang dimiliki kiai. Dengan demikian dapat dipahami persamaan dan perbedaan modal kiai sebelum dan sesudah menjadi bupati untuk kasus Bangkalan. Jika terjadi perubahan bagaimana proses dan faktor apa yang menyebabkan. Mengingat politik adalah aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan, maka perlu diungkapkan apakah kiai sebagai aktor politik, juga berkepentingan melanggengkan kekuasaannya demi mewujudkan tujuan politiknya sebagaimana aktor politik lainnya. Jika kiai juga berkepentingan, cara apa yang digunakan kiai untuk melanggengkan kekuasaannya.

Dalam perspektif Bourdieu, tingkat kekuatan anggota masyarakat (termasuk dalam hal ini kiai) dalam pertarungan politik, sangat ditentukan oleh habitus mereka masing-masing.⁹ Habituslah yang menentukan tingkat kemampuan kiai dalam memainkan modal ekonomi, sosial, simbolik, dan kultural yang mereka miliki sehingga modal-modal tersebut dapat terakumulasi. Mengingat habitus juga yang menentukan respon kiai terhadap

⁸ Faruk, Harga Sebuah Kepekaan dan Suara Lain, Kata Pengantar buku Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat : Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*, (Yogyakarta : LKiS, 1999), hal. xxvi

⁹ Habitus adalah watak (*disposisi*) yang dimiliki oleh individu (dalam hal ini kiai khos) untuk memberikan persepsi dan respon dengan cara tertentu terhadap lingkungan sekitarnya. Disposisi ini bersifat sosial karena merupakan kemampuan yang ditanamkan oleh lingkungan asal dari individu yang bersangkutan. Ditanamkan ke dalam individu tersebut sejak kecil di lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial yang lain (pesantren). Akan tetapi, karena proses penanaman disposisi ini berlangsung lama, terus menerus, dan alamiah, maka beroperasi pada individu secara spontan dan instinktif. Karena merupakan hasil proses sosial, maka habitus itu dimungkinkan secara struktur atau terstruktur. Akan tetapi karena telah tertanam begitu kuat dan dalam, bersifat spontan dan instinktif, habitus tersebut menyatu dengan subjek dan menjadi kekuatan yang menstrukturkan. Selain itu, habitus itupun tidak sepenuhnya harus patuh pada struktur, melainkan dapat mengalami modifikasi atau fleksibilitas sesuai dengan tuntutan yang dihadapi oleh situasi dan kondisi aktual yang dihadapi pemiliknya. Lihat Faruk, Ibid, hal. xxv-xxvii

perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya, sehingga membuat kiai dapat bermain terampil dalam arena politik, yakni pemilihan bupati, maka menjadi penting dipahami pembentukan habitus kiai, juga kekhasan, persamaan, dan perbedaannya. Pemahaman tentang pembentukan habitus kiai dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan antara kultur pesantren dengan kultur politik dan pengaruh habitus pesantren terhadap tindakan politik kiai. Lebih lanjut agar diperoleh penjelasan objektif dalam situasi bagaimana seorang kiai bertindak tanpa pamrih dan dalam situasi yang bagaimana pula seorang kiai memperlihatkan pamrih ekonominya.

Mengingat pemilihan bupati adalah ranah politik kiai dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan posisinya, baik dalam hal penguasaan maupun akumulasi modal, maka penting dipahami bagaimana kapital kultural, sosial, ekonomi dan simbolik kiai sebelum dan sesudah menjadi bupati untuk kasus Bangkalan. Selain itu juga perlu dijelaskan kapital apa yang paling dominan digunakan kiai dalam pemilihan tersebut dan apakah terjadi konversi berbagai kapital yang dimiliki kiai menjadi kapital ekonomi. Dengan kata lain, apakah terjadi pergeseran sumber legitimasi kekuasaan kiai, dari penguasaannya selama ini atas kapital sosial, kultural dan simbolik ke modal ekonomi. Jika memang terjadi pergeseran sumber legitimasi kekuasaan kiai, dapat dijelaskan pula faktor apa yang menyebabkannya, apa makna dan dampak dari pergeseran sumber legitimasi kekuasaan kiai tersebut. Lebih lanjut, agar dapat dipahami adanya pola permainan politik kiai dalam pemilihan dan kepemimpinan bupati Bangkalan.

Berdasarkan uraian di atas, ada tiga penggal permasalahan yang penting dan menarik : *Pertama*, mengingat habituslah yang menentukan respon para kiai terhadap dinamika perubahan politik pemilihan bupati dan habitus juga membuat para kiai dapat bermain dengan terampil dalam pemilihan bupati, maka menjadi penting untuk dijelaskan bagaimana pembentukan habitus para kiai, sebelum dan sesudah menjadi bupati. Hal lain yang tidak kalah penting untuk dijelaskan adalah bagaimana pengaruh habitus pesantren terhadap tindakan politik kiai setelah menjadi bupati.

Kedua, mengingat kiai adalah makhluk politik yang berkepentingan mempertahankan dan meningkatkan posisinya ketika sudah menjadi bupati, baik dalam hal penguasaan maupun akumulasi kapital ekonomi, sosial, simbolik, maupun kulturalnya, maka menarik untuk dijelaskan persamaan dan perbedaan kapital yang dimiliki sebelum dan sesudah menjadi bupati. Dengan memahami kapital yang dimiliki, dapat dijelaskan apakah terjadi ekonomisasi berbagai kapital tersebut. Jika memang terjadi ekonomisasi berbagai kapital kiai, maka dapat dijelaskan bagaimana proses terbentuknya maupun faktor yang mempengaruhinya dan dampak politiknya.

Ketiga, mengingat ranah permainan politik dua kiai tersebut adalah pemilihan bupati secara langsung di kabupaten Bangkalan, Madura, maka menjadi relevan untuk dijelaskan

bagaimana kondisi sosio historis masyarakat Bangkalan, Madura serta pengaruh habitus dan kapital kiai terhadap logika tindakan keterlibatan kiai tersebut dalam pemilihan bupati secara langsung. Dengan kata lain, bagaimana dialektika habitus, kapital dan ranah berkaitan dengan keterlibatan mereka dalam pemilihan tersebut. Secara khusus, artikel ini ingin menjelaskan apa yang menjadi motivasi kiai terjun dalam dunia politik praktis dan bagaimana pengaruh habitus serta kapital yang dimiliki kiai dalam kemenangannya sebagai bupati Bangkalan. Pada akhirnya, studi ini mendiskusikan tiga elemen penting, yaitu kiai, kapital dan habitus, sebuah cara baru memahami dan menilai keterlibatan kiai secara lebih objektif, manusiawi, serta mendalam dalam ranah politik.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah menghasilkan informasi tentang motivasi keterlibatan kiai dalam politik dan pengaruh habitus dan kapital yang dimiliki kiai (baik sosial, kultural, ekonomi dan simbolik) dalam kemenangannya sebagai pejabat publik. Hasil penelitian dapat menjadi pelajaran berharga bagi pemimpin agama baik muslim atau non muslim yang ingin menjadi pejabat publik maupun bagi masyarakat dalam melakukan penilaian terhadap motivasi, cara mencapai dan mempertahankan kuasa serta kinerja pemerintahan yang dilakukan oleh bupati kiai.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini akan menggunakan teori Struktural Genetik Pierre Bourdieu, yaitu konsep habitus, kapital, ranah dan praktik sebagai acuan teoritik untuk menjelaskan keterlibatan kiai dalam pemilihan bupati di Bangkalan mulai dari pencalonan sampai kepemimpinannya. Berikut ini akan dijelaskan konsep habitus, ranah, kapital, konversi antar kapital dan dialektika habitus, kapital, ranah dan praktek.

A. Konsep Habitus

Bourdieu merumuskan konsep habitus sebagai analisis sosiologis dan falsafati atas perilaku manusia. Dalam arti ini, habitus adalah nilai-nilai sosial yang dihayati manusia, dan tercipta melalui sosialisasi nilai-nilai dalam waktu lama, sehingga menjadi cara berpikir dan pola perilaku. Habitus dikemukakan Bourdieu sebagai prinsip dan skema yang menghasilkan serta mengatur praktik dan representasi untuk mengatasi dikotomi antara subjektivisme dan objektivisme. Di satu sisi, praktik dan representasi yang dihasilkan habitus bukanlah hasil kepatuhan pada struktur objektif yang diyakini objektivisme. Akan tetapi, di sisi lain, praktik dan representasi juga bukan merupakan keputusan bebas agen sebagaimana keyakinan subjektivisme, melainkan diarahkan oleh habitus.

B. Ranah Sebagai Arena Pertarungan

Konsep ranah atau arena (*field*) adalah perkakas teoritik Bourdieu selain habitus. Habitus memiliki keterkaitan erat dengan posisi sosial tertentu dalam sebuah ranah. Di satu sisi, habitus mendasari terbentuknya ranah, sementara di pihak lain, ranah menjadi lokus bagi kinerja habitus. Kedua perangkat ini bisa dipahami sebagai *double structuring*, yaitu struktur-struktur objektif (ranah) dan struktur habitus menyatu pada pelaku. Berbeda dengan habitus, ranah berada terpisah dari kesadaran individu yang secara objektif berperan menata hubungan individu-individu. Ranah bukanlah interaksi intersubjektif antar individu, melainkan hubungan yang terstruktur dan secara tidak sadar mengatur posisi individu, kelompok atau lembaga dalam tatanan masyarakat yang terbentuk secara spontan. Bourdieu mendefinisikan ranah sebagai berikut :

“a network, or configuration, of objective relations between positions. These positions are objectively defined, in their existence and in the determinations they impose upon their occupants, agents or institutions, by their present and potential situation (situs) in the structure of the distributions of species of power (or capital) whose possession commands access to the specific profits that are at stake in the field, as well as by their objective relation to other positions (domination, subordination, homology, etc).”¹⁰

Ranah dibentuk dari jaringan relasi antara posisi yang dihuni oleh agen atau institusi. Ranah merupakan arena kekuatan yang di dalamnya terdapat upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya (modal), dan juga demi memperoleh akses tertentu yang dekat dengan hierarki kekuasaan. Ranah juga merupakan arena pertarungan di mana mereka yang menempatnya dapat mempertahankan konfigurasi kekuasaan yang ada. Struktur ranahlah yang membimbing dan memberikan strategi bagi penghuni posisi, baik individu maupun kelompok, untuk melindungi posisi mereka berkaitan dengan jenjang pencapaian social. Apa yang mereka lakukan berdasarkan pada tujuan yang saling menguntungkan bagi produk mereka sendiri. Strategi-strategi agen tersebut bergantung pada posisi-posisi mereka dalam ranah. Ranah dalam penelitian yang akan dilakukan adalah pemilihan bupati secara langsung di Bangkalan, Madura. Adapun praktiknya adalah menjalankan kepemimpinan sebagai bupati.

C. Konsep Kapital

Ada empat jenis kapital yang tersebar dalam ranah sosial. *Pertama*, kapital ekonomi (*Economic Capital*) yang mencakup alat-alat produksi (mesin, tanah, buruh), materi (pendapatan dan benda-benda) dan uang. Kapital ekonomi adalah modal yang secara

¹⁰ Pierre Bourdieu & Loic Waquant, *An Invitation to Reflexive Sociology*, (Chicago : The University of Chicago, 1992), p. 18

langsung dapat dikonversi dalam bentuk uang dan diobjektifkan dalam bentuk hak milik. *Kedua*, kapital budaya (*Cultural Capital*) adalah keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga. *Ketiga*, kapital sosial adalah kumpulan sumberdaya aktual atau potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan saling mengenal dan mengakui. *Keempat*, kapital simbolik, yaitu status atau pengakuan yang dapat mewujudkan menjadi bentuk yang objektif maupun institusi. Segala bentuk prestise, status, otoritas dan legitimasi yang terakumulasi adalah bentuk dari modal simbolik (*Symbolic Capital*). Kapital simbolik juga hadir dalam bentuk yang lunak, yaitu bagaimana individu atau kelompok dipersepsikan. Istilah kiai khos, tradisional, santun, toleran dan inklusif dapat menjadi representasinya.

D. Konversi Antar Kapital

Secara konsepsional, berbagai bentuk kapital terlihat seperti berdiri sendiri. Akan tetapi dalam praktek, semua jenis modal tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Keterkaitan antar kapital inilah yang disebut sebagai konversi antar kapital. Menurut Bourdieu, karakteristik bentuk-bentuk kapital tersebut dapat dipertukarkan satu sama lainnya dan dapat bertambah atau berkurang. Semakin besar seseorang mengakumulasi kapital tertentu, maka akan semakin besar pula peluang untuk mengkonversi antar kapital. Misalnya, seseorang yang mempunyai kelebihan kapital ekonomi dapat leluasa menampilkan kedermawanannya dengan mendirikan yayasan sosial dan keagamaan dengan memanfaatkan networking dengan penguasa dan pengusaha (kapital sosial) untuk memperoleh image sebagai orang baik dan mendapatkan otoritas serta legitimasi sebagai pembela orang miskin (kapital simbolik).

Konsep kapital dan habitus Bourdieu akan digunakan sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan keterlibatan kiai dalam politik, dalam hal ini menjadi bupati dan gubernur. Pembicaraan mengenai kepemilikan tanah, usaha bisnis, dan pesantren dapat dimasukkan ke dalam pembicaraan *kapital ekonomi*. Modal kultural adalah keseluruhan kualifikasi intelektual kiai yang dapat diproduksi melalui pesantren atau pendidikan formal. Faktor pengetahuan agama dan cara transmisinya termasuk dalam *kapital kultural* ini. Sementara itu, *kapital sosial* merujuk pada jaringan yang dimiliki oleh kiai dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa. Sedangkan *kapital simbolik* adalah segala bentuk prestise, status, otoritas, dan gelar.

E. Relasi Praktik Sosial dengan Habitus, Kapital , dan Ranah

Habitus dan ranah berada dalam hubungan dialektis. Di satu sisi, ranah membentuk habitus yang sesuai dengan struktur dan cara kerjanya. Keikutsertaan dalam sebuah ranah mengandaikan kepercayaan dan penerimaan begitu saja terhadap berbagai struktur, aturan,

dan nilai sumberdaya yang diperebutkan di dalamnya. Kepercayaan ini menubuh dalam habitus agen yang merupakan internalisasi struktur objektif ranah. Ia menciptakan logika praktis atau “rasa permainan” pada diri agen, yaitu kemampuan praktis untuk terlibat di dalamnya, dan memberi arti subjektif bagi ranah bahwa ranah itu cukup bernilai untuk diikuti. Di sisi lain, habitus juga membentuk dan mengubah ranah sesuai dengan strukturnya. Makna dan nilai yang terobjektifikasi melalui sejarah dalam bentuk institusi dan mekanisme hanya aktif sepenuhnya jika dihidupkan kembali oleh habitus dalam bentuk praktik.¹¹

Secara ringkas Bourdieu merumuskan strukturalisme genetiknya yang menerangkan praktik sosial secara matematik sebagai berikut :

$$\{(\text{Habitus}) \times (\text{Capital})\} + \text{Field} = \text{Practices.}^{12}$$

Rumus tersebut menjelaskan bahwa setiap relasi sederhana antara individu dan struktur dengan relasi antara habitus dan arena yang melibatkan modal. Hubungan antara habitus yang berlipat-lipat dengan penguasaan modal (*capital*) di tambah dengan arena (*field*) pertarungan, maka menghasilkan praktik, yaitu arena pertarungan memperebutkan kekuasaan (baik penguasaan sumber daya modal maupun kekuasaan politik).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis etnografi. Metode etnografi akan digunakan dalam pengumpulan data. Menurut Nasution, penelitian kualitatif menggambarkan realitas yang kompleks.¹³ Realitas dalam penelitian kualitatif dipandang sebagai sesuatu yang subjektif dan multiple.¹⁴ Pemahaman tentang habitus dan modal yang dimiliki kiai yang menjadi narasumber penelitian akan dilakukan melalui observasi ke pesantren daerah asal kiai, yaitu Bangkalan, Madura. Selain itu juga digunakan teknik wawancara dengan berbagai narasumber terkait yang dapat memberikan penjelasan atau memiliki data-data primer atau sekunder. Adapun teknik dokumentasi dilakukan dengan membaca tulisan atau kitab karangan mereka, dan melakukan penelusuran terhadap pustaka atau literatur yang menjadi rujukan para kiai atau yang menjelaskan permasalahan penelitian. Data deskriptif ini diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan lapangan, ucapan responden, buku-buku ilmiah, majalah, buletin, tabloid dan koran. Observasi ke pesantren, interaksi dan wawancara mendalam dengan kiai serta penelusuran literatur yang menjadi rujukan sekaligus landasan tindakan politik kiai dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dan menghindari bias pemahaman.

¹¹ Indi Aunullah, *Bahasa dan Kuasa Simbolik Dalam Pandangan Pierre Bourdieu*, (Yogyakarta : Skripsi, Fakultas Filsafat UGM, 2006), hal. 50-51

¹² Bourdieu, *Distinction : A Social Critique of The Judgment of Taste*, (London : Routledge, 1984), p. 101

¹³ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik –Kualitatif*, (Bandung : Transito, 1988), hal. 12-14

¹⁴ John W. Creswell, *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*, (California : SAGE 1994), hal.5

Analisis data dilakukan melalui teknik kualitatif, yaitu melakukan analisis untuk memperoleh gambaran dan kategori yang kemudian dipolakan. Pola-pola yang ditemukan kemudian diinterpretasikan maknanya sesuai dengan model analisis penelitian. Analisis ini berbentuk induktif, yaitu membangun teori dari data dengan menyajikan data-data terlebih dahulu kemudian dianalisis, dan akhirnya diambil kesimpulan. Upaya interpretasi data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dianalisis melalui beberapa tahapan, *Pertama*, reduksi data yang bertujuan untuk menyeleksi, memilah, memilih, dan mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori, dan tema tertentu. *Kedua*, display data yaitu menyajikan data dalam bentuk sketsa, sinopsis, dan matriks. *Ketiga*, adalah tahap penarikan kesimpulan. Proses analisis akan dilakukan dengan mengikuti siklus interaktif yang tentunya juga sudah dilakukan sejak awal pengumpulan data.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakter Sosial dan Budaya

Karakter sosial budaya dan adat istiadat masyarakat kabupaten Bangkalan sangat dipengaruhi oleh nuansa keagamaan Islam. Islam adalah agama mayoritas penduduk Madura, termasuk Bangkalan. Pengaruh nuansa keagamaan Islam mewujud dari banyaknya praktik ritual seperti pengajian, tahlilan, mujahadah dan khaul. Tiap rumah memiliki mushola dan masyarakat berlomba-lomba membangun masjid yang bagus di lingkungannya. Bagian ini akan menjelaskan kondisi masyarakat dari sisi agama, pendidikan dan kesejahteraan. Bangkalan dikenal sebagai kabupaten santri.

Tabel 1. Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Bangkalan

| No | Tahun | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha |
|----|-------|---------|-----------|---------|-------|-------|
| 1 | 2012 | 846.650 | 1.547 | 1.240 | 135 | 475 |
| 2 | 2011 | 839.950 | 1.512 | 1.057 | 116 | 63 |
| 3 | 2010 | 839.940 | 1.505 | 1.059 | 116 | 63 |
| 4 | 2009 | 839.850 | 1.496 | 1.496 | 119 | 61 |
| 5 | 2008 | 845.420 | 1.475 | 1.475 | 105 | 58 |
| 6 | 2007 | 843.710 | 1.470 | 1.470 | 106 | 56 |

Meskipun Islam mayoritas, akan tetapi juga terdapat pemeluk agama lain bahkan ada yang mengalami peningkatan jumlah pemeluk setiap tahunnya. Jumlah pemeluk agama Islam justru mengalami pasang surut 845.420 pada tahun 2008 menjadi 839.850 pada 2009. Hal ini menunjukkan ada toleransi beragama di kabupaten Bangkalan. Adapun terkait dengan sarana pendidikan non formal, terdapat sekitar 180 pondok pesantren yang tersebar hampir di setiap kecamatan dengan berbagai variannya. Ada pondok pesantren besar

dengan jumlah santri mencapai ribuan, ada yang menengah dan ada yang kecil. Ada yang khusus mengajarkan ilmu agama semata, tetapi juga ada yang mengajarkan ilmu agama sekaligus ilmu umum. Pondok pesantren Syaikhona Kholil menjadi ikon pesantren di kabupaten Bangkalan. Pesantren ini tidak hanya menjadi cikal bakal di Bangkalan tetapi juga Madura. Tidak terhitung ulama di Madura dan Jawa yang dihasilkan dari pesantren ini. Kiai Mohammad Kholil yang menjadi pimpinannya merupakan tokoh kunci lahirnya organisasi NU (Nahdlatul Ulama). Pada saat itu, beliau menjadi rujukan tidak hanya dalam masalah agama, tetapi juga sosial dan politik.

Selain agama Islam, faktor mata pencaharian dan tingkat pendidikan juga turut mempengaruhi karakter masyarakat kabupaten Bangkalan. Mayoritas masyarakat mengandalkan sektor pertanian dan perikanan. Problem kesejahteraan masih dirasakan oleh masyarakat kabupaten Bangkalan. Rendahnya tingkat pendidikan yang berimbas pada terbatasnya pengetahuan dan lemahnya ketrampilan, minimnya modal untuk usaha dan kurangnya infrastruktur pendukung adalah problem riil yang dihadapi masyarakat. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang telah dicangkan menjadi program pemerintah kabupaten masih belum mencapai tujuan hakikinya. Tujuan hakiki pembangunan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat kabupaten Bangkalan secara merata dan berbasis pada potensi sumber daya alam dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, ekologis dan konservasi sumber daya alam.

Sebagai bagian dari karakter sosial masyarakat Bangkalan adalah menghormati kiai. Kiai memiliki eksistensi dan peran yang istimewa. Kiai bukan saja memiliki peran sentral dalam bidang keagamaan semata, tetapi juga hampir dalam keseluruhan bidang kehidupan. Ungkapan orang Madura yang berbunyi *buppa'-babu'-guruh-ratoh* menjelaskan bagaimana peran sentral kiai tersebut. Ungkapan tersebut menggambarkan hirarki penghormatan di kalangan masyarakat Madura. Elemen utama dalam keluarga yang harus dihormati adalah ayah-ibu (*buppa-babu*). Mereka harus dihormati karena telah melahirkan, mendidik dan membiayai hidup hingga dewasa. Adapun elemen dalam masyarakat yang harus dihormati adalah *guruh* (lebih fokus pada kiai), karena telah memahamkan masyarakat tentang nilai-nilai kebenaran (keagamaan Islam) dalam kehidupan. Elemen terakhir yang juga harus dihormati adalah *ratoh* (pemerintah). Pemerintah adalah pemimpin masyarakat secara keseluruhan sekaligus pembuat kebijakan yang bersifat mengikat dan harus ditaati.

Pengaruh kiai terkadang melampaui batas pengaruh institusi-institusi kepemimpinan lainnya. Kiai menjadi tempat mengadu berbagai permasalahan, tidak hanya agama, tetapi juga masalah pendidikan, rizqi, jodoh, pernikahan, kelahiran, kematian, membangun rumah, membangun jalan, merintis usaha, bercocok tanam, konflik rumah tangga, konflik sosial,

karier, hutang piutang, politik dan berbagai problema hidup lainnya. Ada perasaan tenang dan tentram jika sudah mengkonsultasikan berbagai problem kehidupan dengan kiai dan mendapatkan restunya. Sebaliknya ada perasaan gelisah, galau dan khawatir jika belum berkonsultasi dengan kiai dan belum mendapat restu dari kiai. Kiai yang dapat diterima masyarakat dan memiliki pengaruh luas adalah yang meluangkan waktu dan bersedia mendengarkan berbagai keluhan umat dengan penuh kesabaran. Kehadiran kiai bisa karena memang diundang ke rumah atau umat yang mendatangi kiai. Kiai juga akan memiliki pengaruh kuat jika mampu memberi solusi, menjadi pengayom dan pelindung umat secara riil. Sebagai imbalannya umat akan tunduk, patuh dan taat kepada kiai. Relasi kiai dan umat adalah relasi antara pemimpin dan yang dipimpin yang bersifat paternalistik seperti hubungan ayah dan anak.¹⁵

Secara historis, ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa kiai memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat Madura, yaitu Islamisasi dan ekologi. *Pertama*, keberhasilan islamisasi oleh para kiai (Walisongo) membuat orang Madura identik dengan Islam. Sulit menemukan penduduk asli Madura yang bukan muslim. Warga Madura dikenal sebagai penganut Islam yang fanatik, meski terkadang mereka belum memiliki pemahaman mendalam tentang Islam dan juga belum menjalankan ajaran Islam secara taat. Mereka akan berdiri di barisan terdepan dan siap melawan serta berkorban jika Islam dilecehkan. Mereka mencontoh yang telah dilakukan oleh para kiai ketika masa penjajahan. Pada saat warga Madura berusaha melepaskan diri dari penjajahan, para kiai berada di garda depan memimpin umat tanpa pamrih. Keberadaan ratusan pesantren yang bertebaran di berbagai pelosok desa di bawah kepemimpinan kiai – pada saat di mana lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan madrasah belum ada atau masih terbatas – telah membuat warga Madura tercerahkan dalam bidang agama. Warga Madura merasa berhutang budi pada kiai karena telah mendidik, mengayomi, melindungi dan mencerahkan mereka. Oleh karena dapat dipahami jika mereka sangat hormat kepada kiai dan kemudian menjadikan kiai sebagai pemegang otoritas dalam kehidupan masyarakat. Antara Islam dan Madura adalah dua hal yang saling menyatu dan tidak terpisahkan. Kedua unsur tersebut saling menentukan. Ini berarti jika ada orang asli Madura yang tidak lagi beragama Islam maka orang tersebut tidak lagi disebut sebagai orang Madura. Keanggotaannya sebagai bagian dari kelompok etnik Madura otomatis gugur dan sudah selesai.¹⁶

¹⁵ Contoh pola relasi paternalisme adalah antara bawahan – atasan. Bawahan memberikan kesetiaan dan kepatuhan kepada atasan/ bapak (patriarchi) sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan. Lebih lanjut baa MM. Billah, “Pergolakan NU dan Kelompok Islam”, dalam *Tashwirul Afkar*, Majalah Lakpesdam NU, edisi No.2 Tahun 1998, halaman 53.

¹⁶ Lebih lanjut baca Andang Subahianto, et.al, *Tantangan Industrialisasi Madura : Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur* (Malang : Bayumedia, 2004), hal. 54. Juga Mohammad Kosim, “Islam di Madura : Kajian

Kedua, studi yang dilakukan Kuntowijoyo¹⁷ menunjukkan bahwa tanah di Madura tidak didominasi tanah persawahan tetapi oleh tanah tegalan yang gersang dan tidak produktif. Pengelolaan tanah tegalan tidak memerlukan banyak orang, melainkan cukup dikerjakan oleh individu atau sedikit orang dengan tenaga kerja anggota keluarga. Hal ini membuat kurangnya forum kebersamaan warga. Ekologi tegalan juga membuat pola pemukiman orang Madura sulit membangun kerjasama. Desa terbagi menjadi beberapa dusun kecil yang masing-masing terdiri dari empat sampai lima kepala keluarga. Ada kendala teknis dan ekologis yang membuat mereka sulit menjalin komunikasi intensif. Satu-satunya media atau sarana komunikasi efektif adalah melalui pengajian atau sholat Jumat seminggu sekali yang dipimpin oleh kiai. Umat Islam laki-laki yang telah dewasa wajib mendatangi masjid jami' untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah seminggu sekali. Konsekuensinya, paguyuban keagamaan dengan kiai sebagai tokoh sentralnya menjadi inti dari hubungan sosial di masyarakat Madura. Pada umumnya, kiai berasal dari keluarga bangsawan kaya yang memiliki pesantren dan tanah yang luas.

Secara sosiologis ada dua fungsi kiai di Madura, yaitu sebagai penyampai ajaran Islam dan pemimpin umat. Sebagai penyampai ajaran Islam, kiai merupakan mata rantai keberlangsungan ajaran Islam di muka bumi. Melalui peran ini, kiai diyakini mempunyai otoritas dalam bidang agama karena pemahaman keagamaan yang mendalam. Kedalaman pemahaman dapat dilihat dari lamanya nyantri, jumlah pesantren tempat mencari ilmu, jumlah dan kualitas kiai yang menjadi gurunya dan penguasaan kitab kuning. Jika sosok kiai tersebut adalah alumni Mekah atau Madinah dan tinggal lama di kedua kota suci tersebut maka akan dianggap memiliki kedalaman pemahaman keagamaan yang lebih. Dalam beberapa hal menunjukkan kekhususan dalam bentuk pakaian sebagai simbol ketinggian ilmu yaitu menggunakan jubah dan kopyah putih serta sorban. Sebagai pemimpin umat, kiai telah berhasil membuktikan diri sebagai sosok pemimpin non formal dalam masyarakat, khususnya masyarakat nahdliyin. Pengaruh kepemimpinan kiai sangat ditentukan oleh kedalaman ilmu, kemuliaan akhlak dan wibawa yang dimilikinya. Hal mana tercermin dari kebesaran dan kemajuan pesantren yang dipimpinnya.

Untuk memperoleh predikat sebagai kiai, seseorang harus memiliki kharisma, integritas dan kapasitas keilmuan yang memadai. Kharisma yang dimiliki kiai menjadi salah satu kekuatan yang dapat menciptakan pengaruh dalam masyarakat. Ada dua dimensi

Awal tentang Masuk dan Berkembangnya Islam di Pulau Madura”, *Karsa*, Jurnal STAIN Pamekasan, Vol. VII, No. 1 April 2005, hal. 651-661.

¹⁷ Kuntowijoyo, “Agama Islam dan Politik : Gerakan-Gerakan Sarekat Islam Lokal di Madura 1913-1920”, dalam Huub de Jonge (ed.), *Agama, Kehidupan, dan Ekonomi : Studi-Studi Interdisipliner tentang Masyarakat Madura* (Jakarta : Rajawali Pers, 1989), hal. 51-53

kharisma kiai.¹⁸ *Pertama*, kharisma yang diperoleh seorang kiai secara *given*, seperti tubuh tinggi besar, atletis, sehat, suara yang keras, penglihatan yang tajam dan adanya ikatan geneologis dengan kiai kharismatik sebelumnya. *Kedua*, kharisma yang diperoleh melalui kemampuan dalam penguasaan terhadap pengetahuan keagamaan ditunjang dengan kemuliaan akhlak, kepribadian yang sholeh, keikhlasan dalam beramal dan kesetiaan menyantuni masyarakat.

Kiai dalam pandangan masyarakat Bangkalan adalah sosok kharismatik, penuh wibawa dan alim – dalam arti memahami ilmu agama – dan juga dapat menjadi rujukan tempat mencari nasehat terkait berbagai masalah kehidupan serta dapat menjadi panutan dalam kehidupan. Ketundukan umat terhadap kiai terkadang melampaui batas wajar, karena umat tidak memiliki keberanian mengoreksi atau mengkritisi perkataan dan perbuatan kiai. Ucapan dan perbuatan kiai dianggap kebenaran sehingga jika melawannya maka takut akan kualat atau membuat kiai marah. Kualat dan kemarahan kiai adalah suatu hal yang tabu dan ditakuti masyarakat Madura, termasuk Bangkalan.

Selain kiai, blater adalah rezim yang juga memiliki legitimasi sosial di Bangkalan. Meskipun pengaruhnya masih kalah dibanding kiai, tetapi blater adalah orang kuat lokal dengan basis non keagamaan yang juga memiliki pengaruh dan jaringan luas dalam masyarakat Madura, termasuk Bangkalan. Ia muncul karena penguasaannya terhadap instrumen kekerasan. Ia dikenal karena kemampuannya mengelola sumber-sumber kekerasan sehingga mempengaruhi sistem kesadaran melalui efek teror kekerasan yang kemudian membentuk pola perilaku sosial di masyarakat. Kharisma blater didasarkan pada kapasitas sebagai seorang jagoan (jawara) desa yang mampu memberikan perlindungan keselamatan fisik atau rasa aman terhadap masyarakat dari aksi pencurian, perampokan dan pertikaian antar warga. Sebagai bagian dari elit desa, posisi daya tawar blater cukup kuat. Gerombolan penjahat akan berpikir seribu kali untuk melakukan aksi kejahatan di sebuah desa yang di dalamnya terdapat blater, terlebih lagi blater papan atas. Konflik antar masyarakat seringkali dapat diselesaikan melalui mediasi blater.

Seiring dengan perubahan politik, kiprah blater juga semakin luas. Lingkup pengaruhnya tidak lagi sebatas desa, tetapi juga kabupaten. Bidang pengaruhnya juga bukan lagi sekedar bidang bisnis yaitu menjadi penjaga keamanan tempat usaha dan perkantoran, tetapi juga merambah bidang politik. Politik dalam skala yang lebih luas, yaitu dari politik level desa terkait pemilihan kepala desa menuju pemilihan umum legislatif level kabupaten, provinsi dan nasional, juga pemilihan kepala daerah bahkan pemilihan presiden.

¹⁸ Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menunai Kuasa : Kiprah Kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura* (Yogyakarta : Pustaka Marwa, 2004), hal 87-88

Sosok blater yang telah menjadi legend adalah pak Sakerah, pembela rakyat miskin dari kekejaman penjajah Belanda. Kata-kata Sakerah yang menginspirasi rakyat untuk berani melawan penindasan Belanda sebelum dihukum gantung adalah : “*Gupermen keparat, ja’ anga-bunga, bendar sengko’ mate, settong Sakerah epate’e, saebu Sakerah tombu pole*” (Guperman keparat, jangan bersenang-senang, saya memang mati, satu Sakerah dibunuh, akan muncul seribu Sakerah lagi). Sejak saat itulah orang-orang Madura kalangan bawah mulai berani melakukan perlawanan kepada penindas, dimana senjatanya adalah celurit, sebagai simbolisasi figur Pak Sakerah.

Secara kultural, peranan dan pengaruh blater diperoleh karena dua hal. *Pertama*, kemampuan dalam ilmu kanuragan, bela diri, kekebalan, pemberani dan memiliki jaringan anak buah yang banyak. Sukses dalam mencegah atau mendamaikan konflik antar warga serta meraih kemenangan dalam peristiwa carok, yaitu penyelesaian konflik dengan cara berkelahian menggunakan celurit dengan alasan membela harga diri atau dendam terkait dengan persoalan harta, tahta dan wanita, membuat sosok dan pengaruhnya sebagai blater semakin kuat. *Kedua*, intensitas keterlibatannya dalam tindakan kriminal dan kekerasan, baik langsung atau tidak langsung membuat blater semakin disegani oleh masyarakat dan aparat negara.

Blater dapat berperan secara formal yaitu menjadi *klebun* (kepala desa), atau menjadi tokoh informal desa yang berperan penting dalam mengatur dan mengontrol politik di tingkat desa. Sebagain besar klebun adalah blater atau orang yang dekat dengan komunitas blater. Arena atau media untuk membangun jaringan, ketokohan dan eksistensi sebagai blater dilakukan melalui *carok*, *remoh* (rembug antar blater dalam rangka penggalangan dana disertai pertunjukkan *sandur* (seperti ronggeng kalau di Jawa) dengan sosok penari perempuan *tandhe* atau penari laki-laki yang dirias seperti perempuan) . Acara *remoh* juga diselengi perjudian, minum minuman keras. Jika tuan rumah mampu menyelenggarakan remoh tanpa konflik dan dapat mengumpulkan dana dalam jumlah besar, maka pamornya sebagai blater akan semakin berkibar. Selain remoh, arena para blater untuk berkumpul dan membangun jaringan adalah kerapan sapi (adu kecepatan antar sapi), sabung ayam (*sabung ajhem*) dan aduan merpati (*dhereh*).

Meskipun sama-sama sebagai tokoh kuat lokal yang memiliki legitimasi sosial, akan tetapi ada perbedaan antara kiai dan blater baik dari sisi peran, basis pengaruh, arena pengaruh, habitus dan kapitanya. Perbandingan secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. Perbandingan Kiai dan Blater

| No | Indikator Perbedaan | Kiai | Blater |
|----|--------------------------|--|---|
| 1 | Peran | Tokoh Agama | Jagoan (Jawara) |
| 2 | Basis Pengaruh | Keagamaan | Non-keagamaan (kekerasan) |
| 3 | Arena Membangun Pengaruh | Pengajian, Istighosah, Mujahadah, Bahtsul Masa'il, Khaul, Halaqoh, Aqiqoh, Sunatan, Walimatul Urusy, Tahlilan, Yasinan | Carok, Ramoh Blater, Kerapan Sapi, Pertunjukkan Sandur, Sabung Ayam (Sabung Ajhem), Aduan Merpati (Dhereh) |
| 4 | Habitus | Orientasi Hidup : Untuk Ibadah Visi Hidup : Memberi Manfaat Misi : Amar Ma'ruf Nahi Munkar Gaya Hidup : Sederhana Gaya Bahasa : Halus dan Sopan Ranah Gerakan : Kultural Keagamaan | Orientasi Hidup : Hedonis Visi Hidup : Pragmatis Misi : Pelaku Kekerasan Gaya Hidup : Mewah Gaya Bahasa : Kasar Ranah Gerakan : Kultural non-keagamaan |
| 5 | Kapital | Ekonomi : Pesantren, Sekolah, Perusahaan, Tanah, Uang, Perhiasaan Sosial : Jaringan antar kiai Kultural : Ahli Ilmu Agama Simbolik : Karomah, Waliyullah | Ekonomi : Perusahaan, Uang, Perhiasaan, Tanah Sosial : Jaringan antar Blater Kultural : Keahlian Menggunakan Kekerasan Simbolik : Pemberani |

B. Munculnya Kiai Blater Sebagai Bupati

Salah satu perubahan politik Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru adalah pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada langsung). Pilkada langsung telah memberi harapan dan peluang bagi kiai sebagai elit lokal untuk tampil sebagai *umara* (penguasa). Setelah selama kurang lebih 32 tahun, kiai hanya identik dengan tokoh agama semata maka runtuhnya Orde Baru memberi angin segar bagi kiai untuk tampil sebagai elit politik. Kiai kini tidak lagi hanya berada di belakang layar menjadi tim sukses atau pendulang suara, tetapi telah menjadi pemain politik (*political player*) atau pemimpin politik (*political leader*). Kekuasaan kiai muncul dengan basis sosial, ekonomi dan religi yang sudah dimilikinya. Pasca reformasi, di seluruh kabupaten di pulau Madura, kiai sebagai elit agama muncul sebagai kekuatan politik baru. Beberapa politisi kiai di Madura dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. Politisi Kiai Era Reformasi di Madura

| Daerah | Jabatan | Riwayat Pendidikan | Riwayat Organisasi |
|-----------|--|--|---|
| Bangkalan | <ol style="list-style-type: none"> 1. KH. Fuad Amin Imron <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota DPR RI periode 1999-2004 b. Bupati Bangkalan dua periode 2003-2013 c. Ketua DPRD Bangkalan 2014 – 2019 2. KH. Makmun Ibnu Fuad Bupati Bangkalan periode 2013-2018 3. Syafik Rofi'i Wakil Bupati Bangkalan periode 2003-2008 | Pengasuh Pondok Pesantren “Syaichona Kholil” Kabupaten Bangkalan | Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kab. Bangkalan dan DPW PKB Prov. Jawa Timur |
| Sampang | <ol style="list-style-type: none"> 1. KH. Fannan Hasib (Wakil Bupati) 2. KH. Mu'in Zain (Ketua DPRD) | Pengasuh Pondok Pesantren | Pengurus PCNU Kabupaten . Sampang |
| Pamekasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. KH. Kholillurohman (Bupati) 2. KH. Achmad Syafi'i Yasin (Bupati) | Pengasuh PP Matssaratul Huda | Ketua PCNU Kabupaten Pamekasan |
| Sumenep | KH. Ramdhan Siroj (Bupati) | Pengasuh PP Nurul Islam | Ketua PCNU dan Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Sumenep |
| | KH. Abuya Busyro Karim (Bupati) | Pengasuh PP Al Karimiyah | Ketua Tanfidz NU |

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam pemilihan kepala daerah era reformasi di empat kabupaten di Madura telah menempatkan kiai pada posisi penting dan patut menjadi perhatian. Kepala daerah terpilih adalah trah kiai atau memiliki hubungan kekerabatan dengan sosok kiai. Sebut saja Bupati Bangkalan terpilih pada periode 2003-2013 dan 2013-2018 yaitu KH. Fuad Amin Imron dan KH. Muhammad Makmun Ibnu Fuad. Keduanya merupakan ayah dan anak serta keturunan dari kiai Kholil. Demikian juga dengan Bupati Sampang periode 2013-2018 yaitu KH. Fannan Hasib, Bupati Pamekasan periode 2003-2008 yaitu KH. Achmad Syafi'i Yasin dan Bupati Sumenep periode 2010-2015 yaitu KH. Abuya Busyro Karim.

Tampilnya kiai pesantren (*Ulama*) sebagai *Umara'* (Bupati, Wakil Bupati atau anggota DPR/DPRD) menimbulkan kritikan sekaligus harapan. Mereka yang mengkritik berpendapat bahwa tampilnya kiai sebagai *Umara'* hanya akan menghambat proses demokratisasi dan pembangunan di daerah. Budaya feodalistik konservatif ala pesantren yang terbingkai dalam bahasa agama akan menghambat roda kepemimpinan pemerintahan. Demikian juga kultur *sami'na wa atho'na* (sendiko dawuh) atau membenarkan semua perkataan kiai, tidak berani berbeda pendapat atau mengkritisi pendapat kiai kurang kondusif untuk membangun birokrasi pemerintahan yang efektif. Terlebih lagi kualitas

personal kiai yang tidak pernah bersentuhan dengan dunia birokrasi dan pemerintahan membuat kiai akan kesulitan melakukan adaptasi kepemimpinan. Politik pemerintahan adalah dunia yang sangat dinamis sehingga membutuhkan figur yang memiliki keilmuan serta wawasan akademik yang luas terasa berbeda dengan figur kiai pesantren. Dunia politik pemerintahan identik dengan kompetisi yang keras, medan pertarungan menangkalah bukan baik-buruk bahkan cenderung menggunakan semua cara untuk mencapai tujuan utama, yaitu kekuasaan. Prinsip yang dipegang adalah tidak ada kawan atau lawan yang abadi, karena yang abadi adalah kepentingan. Kepentingan bisa berubah dalam waktu singkat tanpa memperhitungkan etika dan moral. Dunia politik pemerintahan seperti itu jelas bukan dunia untuk para kiai. Habitus kiai bukan di ranah politik pemerintahan tapi di pesantren yang identik dengan perjuangan benar-salah dengan mengedepankan etika moral.

Pada sisi lain, muncul harapan dan optimisme terkait dengan masuknya para kiai dalam ranah politik praktis. Mengingat banyaknya kasus politisi korup atau busuk. Fakta berbicara banyak anggota DPR/DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota yang tertangkap tangan oleh KPK karena melakukan suap atau korupsi. Dengan latar belakang habitus pesantren yang positif dan kapital baik ekonomi, sosial, kultural serta simbolik sosok politisi kiai diharapkan mampu memberi pencerahan dan mewujudkan pemerintahan yang bermoral. Kiai adalah sosok yang memiliki semua modal tersebut, yaitu modal sosial berupa jaringan antar kiai, modal ekonomi adalah kekayaan, modal budaya penguasaan ilmu agama dan transmisi keilmuannya serta modal simbolik yaitu kelompok elit agama yang memiliki kharisma. Figur kiai dianggap mampu membawa perubahan positif pada organisasi pemerintahan karena selama ini dinilai tidak berhasil dan mengecewakan.

Perubahan politik pasca reformasi menyebabkan perluasan arena kiai maupun blater, dari ranah kultural ke struktural dan dari desa ke kota. Desentralisasi dan liberalisasi telah memunculkan orang kuat lokal Bangkalan, yaitu kiai dan blater untuk mengakses kekuasaan. Mereka yang memiliki potensi dan modal ekonomi, sosial, kultural dan simbolik yang kuat akan mudah tampil di panggung politik. Buah dari reformasi, KH. Fuad Amin Imron (Ra Fuad¹⁹) pengasuh pondok pesantren Syaikhona Kholil berhasil menjadi anggota DPR RI periode 1999-2004. Ra Fuad adalah putra dari KH. Amin Imron, sosok kiai sekaligus politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tingkat nasional. KH. Amin Imron adalah cucu dari Syaikhona Kholil, kiai besar Bangkalan. Beliau adalah tokoh sentral dibalik lahirnya organisasi besar Islam NU. Syaikhona Kholil juga telah banyak melahirkan kiai-kiai besar yang tersebar di Jawa dan Madura. Pada akhir abad ke-19, hampir tidak ada kiai

¹⁹ Ra berasal dari kata *Lora* yang dalam bahasa Madura artinya putra kiai. Sama seperti Gus dalam bahasa Jawa

besar yang tidak nyantri (menjadi murid) kiai kholil. Kebesaran dan kemasyhuran kiai kholil tidak hanya terasa di Jawa maupun Madura tapi juga se antero Indonesia. Sesuai tradisi nahdliyin, semua orang takzim kepada kiai kholil termasuk keturunannya. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya penziarah yang tidak pernah berhenti mendatangi makamnya di sebelah pesantren Syaikhona Kholil di Bangkalan. Kharisma yang besar dari kiai Kholil mampu menutupi kharisma kiai-kiai lain pada masanya. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa masyarakat Bangkalan sangat segan dan hormat kepada Syaikhona Kholil dan otomatis juga kepada keturunannya. Ra Fuad adalah keturunan langsung dari kiai Kholil, yaitu cicit dari Syaikhona Kholil. Status inilah yang membuat Ra Fuad begitu dihormati di Bangkalan.

Pandangan demikian mendarah daging terkait posisi sosiologis dan fakta politik yang ada selama ini. Secara sosiologis di Pulau Madura, Fuad Amin berada pada lingkungan kasta tertinggi. Dia cucu ulama yang sangat masyhur di eranya dan menjadi guru utama para kiai se-Jawa-Madura. Walaupun keilmuan dan perilaku belum tentu linear dengan sang kakek, Fuad Amin mewarisi privilese. Dengan bekal sebutan Lora—sapaan bagi putra kiai yang lazim digunakan di masyarakat berkultur Madura, Fuad Amin secara otomatis menjadi orang yang dihormati dan berpengaruh. Fuad Amin menyadari potensi tersebut dan kemudian mengonversinya menjadi sumber kekuatan politik. Ia pun sukses besar. Berturut-turut dia menduduki posisi di DPR RI dari PPP dan PKB, menjadi bupati dua periode. Selanjutnya ia lompat menjadi ketua DPR Partai Gerinda, mendudukkan anaknya sebagai bupati dan Fuad Amin menjabat posisi ketua DPRD. Sepertinya, untuk meraih posisi politik bagi Fuad Amin semudah membaik telapak tangan. Dengan posisi demikian, siapa pun yang ingin memenangkan pertarungan politik di Madura harus meraih dukungan Fuad Amin. Hasil kerjanya terlihat ketika ia mampu memberikan garansi kemenangan untuk pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada Pilgub Jatim. Dengan kekuasaannya dengan mudah ia menggerakkan klebun (kepala desa) dan blater (preman) untuk memobilisasi suara dengan segala cara hingga Mahkamah Konstitusi (MK) memfatwa ada pelanggaran pilkada yang terstruktur, sistematis, dan masif. Akan tetapi hukum tetap berjalan di tempat alias mandul.

Dibawah pimpinan Ra Fuad, PKB selalu menjadi pemenang baik di Jatim maupun Bangkalan. Pada pemilu legislatif tahun 1999 dan 2004, PKB Jawa Timur berhasil mendapatkan 24 kursi, sementara pada pemilu legislatif 2009, PKB Bangkalan berhasil mendapatkan 10 kursi. Dengan modal politik yang sangat kuat inilah, terutama sebagai bagian dari klan bani Kholil, Ra Fuad berhasil menang mutlak dalam pemilihan Bupati Bangkalan pada tahun 2003 dan 2008. Seandainya tidak ada pembatasan masa jabatan Bupati, dapat dipastikan bahwa Ra Fuad akan menjadi Bupati Bangkalan seumur hidup.

Akan tetapi karena Ra Fuad sudah menjabat dua periode, maka beliau tidak dapat lagi maju sebagai kandidat Bupati.

Setelah tidak dapat mencalon diri lagi, Ra Fuad awalnya berencana mencalonkan istri mudanya yaitu Nyai Siti Masnuri Fuad Amin sebagai kandidat bupati angkatan 2013-2018. Akan tetapi ternyata yang beliau ajukan sebagai kandidat adalah putra kesayangannya, yaitu Makmun Ibnu Murod (Ra Momon) yang berpasangan dengan Ra Mondir Rofi'i. Pasangan ini berhasil mengalahkan pesaingnya yaitu pasangan Nizar Zahro dan Zulkifli secara mutlak dengan perolehan suara mencapai 90 persen. Sebetulnya ada tiga pasang calon dalam pemilihan bupati langsung di Bangkalan, yaitu KH. Imam Bukhori (Ra Imam) dan HR. Zainal Alim sebagai pasangan nomor urut 1, Makmun Ibnu Murod (Ra Momon) dan Mundir Rofi'i (Ra Mundir) sebagai pasangan nomor urut 2 dan pasangan nomor urut 3 yaitu Nizar Zahro dan Zulkifli. Saingan terberat Ra Momon adalah Ra Imam. Akan tetapi karena ada konflik internal dari partai pendukung pasangan nomor urut 1, yaitu Partai Persatuan Daerah yang berganti nama menjadi Partai Persatuan Nasional maka pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 1 didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bangkalan. Praktis Ra Momon tidak memiliki saingan berat sehingga dapat menang mudah. Ra Momon juga tercatat sebagai bupati termuda, karena pada saat dilantik baru berusia 26 tahun.

Kemenangan partai Gerindra, keberhasilan menempatkan anaknya sebagai bupati, menjadikan dirinya sendiri sebagai ketua DPRD, dan mendudukkan beberapa keluarganya dan koleganya di kursi DPRD menunjukkan kehebatan permainan politik Fuad Amin. Dalam konteks ini Fuad Amin telah membangun dinasti kekuasaan dan menempatkan dirinya sebagai raja, mirip dengan apa yang pernah dilakukan mantan Gubernur Banten Atut Chosiyah. Karena kekuasaannya pula, Fuad Amin dengan mudah mendepak para pesaing dan membuat institusi negara tak berkutik menghadapinya. Tumpukan kehebatannya itu pun mengkrystal menjadi mitos Fuad Amin sebagai orang kuat yang bisa berbuat apa saja dengan segala cara. Namun, mitos itu kini luruh begitu saja. Pepatah sepandai-pandainya bajing melompat pasti akan jatuh juga kembali menemukan relevansinya. Fuad Amin kini hanyalah seorang pesakitan. Blater yang konon menjaga rumahnya dengan senjata tajam pun tidak bisa berbuat apa-apa. KPK membuktikan mitos itu tidak ada artinya. Runtuhnya mitos kuasa Fuad Amin sangat terkait dengan kegagalan Prabowo sebagai presiden, sehingga tidak memiliki akses atau cantolan politik di tingkat nasional.

Perilaku politik Fuad Amin yang cenderung bebas nilai dan menggunakan semua cara termasuk kekerasan baik ketika mau meraih maupun mempertahankan kekuasaan menunjukkan bahwa habitus blater lebih dominan mempengaruhinya dibanding habitus kiai. Dari perspektif ini bisa dipahami jika banyak yang menyebut Fuad Amin sebagai kiai blater,

bahkan ada yang mengatakan bahwa ia bukan kiai tetapi blater. Ia membangun oligarki politik melalui dua basis sosial di masyarakat. *Pertama*, konstruksi sosial sebagai keturunan syaikhona kholil, ulama kharismatik Bangkalan yang menjadi panutan dan ikon spiritual keagamaan kaum nahdliyin, khususnya Bangkalan. Fuad Amin melakukan politisasi kharisma kiai kholil untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. *Kedua*, konstruksi sosial sebagai bagian dari blater. Dalam upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan, ia menggunakan jasa klebun (kepala desa) yang sebagian besar berasal dari blater.

Dengan mempolitisir kedua basis sosial tersebut, Fuad Amin mampu mengendalikan politik pemerintahan Bangkalan dua periode secara oligarkis. Melalui konspirasi, banyak blater yang mendapatkan proyek pemerintah mulai dari pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan Suramadu, perumahan, jalan dan fasilitas umum lainnya. Tidak sedikit blater yang mendirikan perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) agar bisa menang tender untuk mendapatkan proyek pemerintah. Blater yang menang juga berfungsi sebagai penjaga keamanan jika ada penolakan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau masyarakat terkait pembangunan atau ketidakadilan dalam pembayaran ganti rugi pembebasan lahan. Fuad dan kroninya juga memainkan peran sebagai broker suara dalam berbagai arena demokrasi elektoral bagi politisi yang ingin mendulang suara baik dalam pemilu legislatif, pilkada maupun pilpres. Fenomena beberapa TPS yang berisi kotak kosong untuk pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam pilpres 2014 menunjukkan hasil kerja mafia kiai blater. Pada saat pilpres, Fuad Amin menjadi tim sukses Prabowo-Hatta.

KESIMPULAN

Desentralisasi dan liberalisasi politik membawa konsekuensi munculnya elit lokal sebagai pemain politik. Kiai dan blater sebagai dua elit lokal Bangkalan yang berbeda basis sosial juga tampil dalam panggung politik. Peran dan arena permainan mereka mengalami pergeseran dari aktor desa menjadi aktor kota atau lintas desa, dari sekedar pemain belakang menjadi pemain depan baik dalam ekonomi maupun politik. Fuad Amin menjadi ikon kiai blater yang mampu menjadi bupati. Habitus sebagai blater justru terlihat dominan pengaruhnya, sebagaimana terlihat dalam perilakunya yaitu menggunakan semua cara termasuk kekerasan dan kelicikan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya. Motivasi menjadi bupati lebih karena ingin memperluas lokus dan pengaruh politiknya, bukan pertimbangan amar ma'ruf nahi munkar. Ia melakukan kapitalisasi modal simbolik yang dimilikinya untuk kepentingan diri dan keluarganya. Klaim sebagai cucu syaikhona kholil, kiai kharismatik Bangkalan, guru dari sebagian besar kiai di Jawa dan Madura, termasuk KH, Hasyim Asyari pendiri NU. Dengan cara itu, para kiai dan rakyat mayoritas selalu membenarkan semua ucapan dan tindakan politiknya dengan dalih waliyullah,

memiliki kharomah dan kesaktian. Sesuatu yang kemudian terbukti bahwa itu semua adalah kedok untuk menutupi kejahatan yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gaffar Karim, 1995, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia*, Yogyakarta : LKiS
- Abdul Chalik, 2010, *NU Pasca Orba*, Disertasi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Tidak Dibukukan
- Abdul Haris, 2010, *Pergeseran Perilaku Politik Kultural NU di Era Multi Partai Pasca Orba*
- Abdul Wahid, *Mutilasi Peran Esoteris Kiai*, Padang To Day, 12 Maret 2011
- Andree Feillard, 1999, *NU vis-avis Negara : Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta : LKiS
- Ali Maschan Moesa, 2002, *Agama dan Demokrasi : Komitmen Muslim Tradisional Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan*, Pustaka Dai Muda, Surabaya
- _____, 2007, *Nasionalisme Kiai : Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, Yogyakarta : LKiS
- _____, 1999, *Kiai dan Politik dalam Wacana Civil Society*, Surabaya : LEPKISS
- Abdul Djamil, 2001, *Perlawanan Kiai Desa : Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifai Kalisasak*, Yogyakarta : LKiS
- Abdul Munir Mulkan, 1992, *Runtuhnya Mitos Politik santri*, Jakarta : Siepress
- Abdurrahman Wahid, 2004, *Intelektual Pesantren : Perhelatan Agama dan Tradisi*, Yogyakarta : LKiS
- Ahmad Zahra, 2004, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta : LKiS
- Ahmad Nur Fuad, *Kontinuitas dan Diskontinuitas Pemikiran Keagamaan Dalam Muhammadiyah, 1923-2008 : Tinjauan Sejarah Intelektual*, Disertasi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya
- Achmad Patoni, 2007, *Peran Kiai Pesantren dalam Politik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Achmad Zaini, 2003, *NU dan Politik, NU dan Politik : Studi Tentang Konflik-Konflik Internal NU 1952-2003*, Tesis UI, Tidak Dibukukan
- Ali Haedar, 1998, *NU dan Islam di Indonesia : Pendekatan Fiqh Dalam Politik*, Jakarta : Gramedia
- Arnold C. Brackman, 1963, *Indonesian Communism : A History*, New York : Frederrick A. Praeger
- Anselm Strauss, Juliet Corbin, 1990, *Basic of Qualitative Research : Grounded Theory and Techniques*, California : SAGE Publications, Inc
- Arizal Mutahir, 2011, *Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu : Sebuah Gerakan Untuk Melawan Dominasi*, Yogyakarta, Kreasi Wacana
- Bagong Suyanto, (ed), 2010, *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*, Yogyakarta, Aditya Media
- Bagus Takwim, 2006, *Habitus : Perlengkapan dan Kerangka Panduan Gaya Hidup dalam Resistensi Gaya Hidup : Teori dan Realitas*, Yogyakarta, Jalasutra
- Burhan Mungin, 2007, *Penelitian Kualitatif : komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Badrin Alaena, 2000, *NU : Kritisme dan Pergeseran Makna Aswaja*, Yogyakarta : Tiara Wacana
- Bahrul 'Ulum, 2002, *Bodohnya NU atau NU Dibodohi? Jejak Langkah NU Era Reformasi : Menguji Khittah, Meneropong Paradigma Politik*, Ar-Ruzz, Yogyakarta

- Bambang Pranowo, 1991, *Ceating The Tradition of Islam in Java*, Disertasi tidak dibukukan
- Binhad Nurrohmat, (Peny), 2010, *Dari Kiai Kampung ke NU Miring*, Malang : Avveroes
- Clifford Geertz, 1960, *The religion of Java*, New York, The Free Press
- Glenceo _____, 1959, "The Javanese Kyai : The Changing Role of Cultural Broker", dalam *Comparative Studies in Society and History*
- Dawam raharjo, 1983, *Dunia Pesantren Dalam Peta Pembaharuan*, Jakarta : LP3S
- Donald Hindley, 1966, *The Communist Party in Indonesia, 1951-1963*, Berkeley and Los Angeles : University of California Press
- Djam'an Satori, Aan Komariah, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Endang Turmudzi, 2003, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta : LkiS
- E.Kristi Poerwandari, 1994, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*, Jakarta : LPSP3 Fakultas Psikologi UI
- Flick Uwe, 1995, *An Introduction to Qualitative Research*, London : SAGE Publications
- Ernst Utrecht, 1959, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Ikhtiar
- Fauzi Fashri, 2007, *Penyingkapan Kuasa Simbol : Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu*, Yogyakarta, Juxtapose
- Flick Uwe, 1995, *An Introduction to Qualitative Research*, London : SAGE Publications
- Greg Fealy, 2003, *Ijtihad Politik Ulama : Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta : LKiS
- Hamid Patilima, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Haedar Nashir, 2007, *Gerakan Islam Syariat : Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Jakarta, PSAP
- Haryamoko, 2003, *Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa : Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu*, Jurnal Basis Edisi Khusus Pierre Bourdieu, No 11-12
- Hiroko Horikoshi, 1987, *Kiai dan Perubahan Sosial*, Jakarta : P3M
- Ibn Qoyim Ismail, 1997, *Kiai Penghulu Jawa : Peranannya di Masa Kolonial*, Jakarta : GIP
- lik Arifin Mansur Noor, 1990, *Islam ini an Indonesian World : Ulama of Madura*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Imron Arifin, 1992, *Kepemimpinan Kiai : Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*, Malang : Kalimasada Press
- Imam Nahrawi, 2005, *Moralitas Politik PKB : Aktualita PKB Sebagai Partai Kerja, Partai nasional dan Partai Modern*, Malang : Averroes
- In'am Sulaiman, 2010, *Masa depan Pesantren: Eksistensi Pesantren Di Tengah Gelombang Modernisasi*, Malang : Madani
- Indi Aunullah, 2006, *Bahasa dan Kuasa Simbolik Dalam Pandangan Pierre Bourdieu*, Yogyakarta : Fakultas Filsafat UGM
- John W. Creswell, 1994, *Research Design Qualitative and Quantitative Approach*, London : SAGE Publications
- Kang Young Soon, 2008, *Antara Tradisi dan Konflik : Kepolitikan NU*, Jakarta : UI Press
- Kacung Marijan, 1992, *Quo Vadis NU : Setelah Kembali Ke Khittah 1926*, Jakarta : Erlangga
- Khamami Zada (ed.), 2010, *Nahdlatul Ulama : Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, Jakarta : Kompas
- Khoiruddin, 2005, *Politik Kiai : Polemik Keterlibatan Kiai Dalam Politik*, Malang : Averroes
- Komaruddin Hidayat, M. Yudie Haryono, 2004, *Manuver Politik Ulama : Tafsir Kepemimpinan Islam dan Dialektika Ulama-Negara*, Yogyakarta : Jalasutra
- Leslie Palmer, 1973, *Communists in Indonesia*, London : Weidenfeld and Nicholson
- Luluk Yunan Ruhensi, *Kiai dan Pendidikan Pesantren : Studi Tentang Motif Perubahan Perilaku Kiai Pesantren di kabupaten Ponorogo*, Disertasi, Tidak Dibukukan
- M.Faiqul Ikhsan, *Khittah 1926 dan Perilaku Politik Ulama NU*, Tesis, Tidak dibukukan
- Martin van Bruinessen, 1994, *NU : Tradisi, Relasi Kuasa dan pencarian wacana Baru*,

Yogyakarta :LKiS

- Mahrus Irsyam, 1984, *Ulama dan Partai Politik*, Jakarta : Yayasan Perkhidmatan
- M.Muchsin Jamil, 2005, *Tarekat dan Dinamika Sosial Politik : Tafsir Sosial Sufisme Nusantara*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Manfred Ziemek, 1986, *Pesantren dalam Perubahan*, Jakarta : P3M
- Masruhan, 2010, *Konflik Politik Kiai NU Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008 : Analisis Fiqh Ikhtilaf*, Disertasi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Tidak Dibukukan
- Mochtar Naim, 1960, "The Nahdlatul Ulama as a Political Party, 1952-1955 : An Enquiry into the Origins of Its Electoral Success", (MA Thesis, McGill University)
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta : UI Press
- Michael Quinn Patton, 2009, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Nirzalin, *Krisis Agensi Politik Teungku Dayah di Aceh*, Disertasi, Program Doktor Sosiologi, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2011
- Norman Blaikie, 2000, *Designing Social Research*, Cambridge UK : Polity Press
- Norman.K.Denzin, Yvonna S.Lincoln (Eds.), 2008, *The Landscape of Qualitative Research*, London : SAGE Publications
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (Eds.), 1994, *Handbook of Qualitative Research*, London : SAGE Publications
- Pierre Bourdieu, 1991, *Language and Symbolic Power*, Cambridge, Polity Press
- _____, 1990, *Outline of a Theory of Practice*, Cambridge, Cambridge University Press
- _____, 1984, *Distinction : A Social Critique of the Judgment of Taste*, London, Routledge
- _____, 1990, *In Other Words : Essays Towards a Reflexive Sociology*, Cambridge, Polity Press
- Pradjarta Dirdjosanjoto, 1999, *Memelihara Umat : Kiai Pesantren, Kiai Langgar di Jawa*, Yogyakarta :LKiS
- Richard Harker, et.all, 2003, *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik*, Yogyakarta, Jalasutra
- Ridwan, 2004, *Paradigma Politik NU : Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Rexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda
- Rozaki, Abdur, 2003, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa : Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim Kembar di Madura*, Yogyakarta : Pustaka Marwa
- _____, 2016, *Islam, Oligarki Politik dan Perlawanan Sosial*, Yogyakarta : SUKA Press
- Sabili, *Islam Kawan atau Lawan*, Majalah Islam Edisi Khusus, Juli 2004
-
- Sabili, *Sejarah Emas Muslim Indonesia*, Majalah Islam, No.9 Th.X 2003
- Sholahuddin Malik, *Kepemimpinan Pesantren dan Rutinisasi Kharisma, Studi di PP As-Syafi'iyah*, Jakarta, Tesis UI, Tidak dibukukan
- Syaiful Arif, 2010, *Runtuhnya Politik NU : Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, Jakarta : Kompas
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : Alfabeta
- _____, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Sidik Jatmika, 2005, *Kiai dan Politik Lokal : Studi Tentang Reposisi Politik Kiai NU Kebumen, Jawa Tengah Memanfaatkan Peluang Keterbukaan Partisipasi di Era Reformasi*, Disertasi, Program Doktor Sosiologi UGM, Tidak Dibukukan
- Sukamto, 1999, *Dinamika Kepemimpinan Kiai*, Jakarta : LP3S
- Sunyoto Usman, 1990, *Local Elities and development*, Flinders University, Australia, Disertasi, Tidak Dibukukan
- _____, *Komunitas Tarekat dan Politik Lokal di Era Orde Baru, Penelitian di Kudus, Jawa Tengah*, Jurnal JSP, Fisipol UGM, Juli 1998
- S. Nasution, 1988, *Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif*, Bandung : Transito

Tashwirul Afkar, *Simpang Jalan NU*, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, Edisi No. 17 Tahun 2004

Yusny Saby, 2000, *A Profile Of The "Ulama" in Acehnese Society*, *Al Jamiah (Journal Of Islamic Studies)*, Yogyakarta : Volume 38, Number 2

Zainal Arifin Thoha, 2003, *Runtuhnya Singgasana Kiai : NU, Pesantren dan Kekuasaan, Pencarian Tak Kunjung Selesai*, Yogyakarta : Kutub

Zamakhsyari Dhofier, 1982, *Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta : LP3ES